



PRAKTEK DIPLOMASI SIBER DI ERA *POST TRUTH*

(*CYBER DIPLOMACY PRACTICE IN THE POST-TRUTH ERA*)

Meitty Josephin Balontia, M.Han
Character Building Development Center, Binus University
Email: meitty.josephin@binus.ac.id

Abstract: *In the current digital era, diplomacy has experienced a significant transformation with the emergence of the "post-truth" phenomenon, which challenges the traditional diplomacy framework. This article discusses the practice of cyber diplomacy in the post-truth era, identifying the problems that arise. The main focus is how cyber diplomacy can adapt to the dynamics of distorted and often non-factual information in the post-truth era. In addition, this article also considers the impact of the post-truth phenomenon on the effectiveness of cyber diplomacy practices in achieving political and security goals. This research aims to investigate the role of cyber diplomacy in overcoming emerging challenges in the post-truth era and to evaluate effective strategies for managing distorted information online. The approach used in this research is a descriptive and qualitative analysis of cases of cyber diplomacy practices in several countries, focusing on the strategies used to respond to non-factual information. The research method involved analysis of official documents, interviews with diplomats experienced in cyber diplomacy, and surveys of people affected by distorted information online. The research results show that cyber diplomacy requires an innovative and adaptive approach to facing information challenges in the post-truth era. Strategies such as training diplomats to recognize and respond to disinformation and international cooperation in developing new standards for online information governance are crucial to overcoming these problems. The conclusion of this research is that cyber diplomacy must continue to develop and adapt to changes in the digital information landscape and work together with various stakeholders to face the challenges of the post-truth era effectively.*

Keywords: Cyber Diplomacy, Post-Truth Era, Information Challenges, Adaptation to Diplomacy, Strategy for Countering Disinformation.

Abstrak: Pada era digital saat ini, praktik diplomasi telah mengalami transformasi signifikan dengan munculnya fenomena "post-truth" yang menantang kerangka tradisional diplomasi. Artikel ini membahas tentang praktik diplomasi siber di era post-truth, mengidentifikasi persoalan-persoalan yang muncul. Persoalan yang menjadi fokus utama adalah bagaimana diplomasi siber dapat beradaptasi dengan dinamika informasi yang terdistorsi dan seringkali tidak faktual di era post-truth. Selain itu, artikel ini juga mempertimbangkan dampak dari fenomena post-truth terhadap efektivitas praktik



diplomasi siber dalam mencapai tujuan-tujuan politik dan keamanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran diplomasi siber dalam mengatasi tantangan-tantangan yang muncul di era post-truth dan untuk mengevaluasi strategi-strategi yang efektif dalam mengelola informasi yang terdistorsi secara online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kualitatif terhadap kasus-kasus praktik diplomasi siber di beberapa negara, dengan fokus pada strategi-strategi yang digunakan untuk menanggapi informasi yang tidak faktual. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen-dokumen resmi, wawancara dengan diplomat-diplomat yang berpengalaman dalam diplomasi siber, serta survei terhadap masyarakat yang terpengaruh oleh informasi yang terdistorsi secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi siber memerlukan pendekatan yang inovatif dan adaptif dalam menghadapi tantangan-tantangan informasi di era post-truth. Strategi-strategi seperti pelatihan diplomat-diplomat dalam mengenali dan merespons disinformasi serta kerja sama internasional dalam mengembangkan standar-standar baru untuk tata kelola informasi online menjadi kunci dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa diplomasi siber harus terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam lanskap informasi digital, serta bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadapi tantangan-tantangan di era post-truth dengan efektif.

Keyword: Diplomasi Siber, Era Post-Truth, Tantangan Informasi, Adaptasi Diplomasi, Strategi Penanggulangan Disinformasi.

1. Pendahuluan

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi khususnya keberadaan ruang komunikasi digital, dunia manusia menjadi lebih luas. Keberadaan manusia di dalam dunia pun mengalami perubahan. Manusia tidak hanya mengenal dunia fisik dimana ia bertemu dengan sesama serta realitas lainnya namun juga, mengenal dunia digital dimana ia dalam arti tertentu, bebas bergerak, mengarahkan diri dan terlibat dengan sesama manusia.



Secara praktis, keberadaan ruang komunikasi digital membantu manusia mengatasi berbagai keterbatasan alamiah sebagai manusia bertubuh yang terikat pada ruang dan waktu. Misalnya saja, ruang komunikasi digital memungkinkan kita untuk saling mengirim kabar dalam hitungan detik melalui *smartphone* kepada orang di ujung dunia manapun, sejauh kita dan orang tersebut memiliki perangkat serta jaringan internet. Dengan kata lain, ruang komunikasi digital menjadi perpanjangan diri manusia untuk melaksanakan berbagai interaksi, tanpa kuatir terhadap batasan alamiah manusia. Lebih lanjut, ruang komunikasi digital juga menghadirkan berbagai peran baru di dalam masyarakat. *Social media data analyst*, *content creator* atau yang kita kenal dengan *social media influencer*, adalah beberapa peran baru yang dimungkinkan karena adanya ruang komunikasi digital. Orang kemudian berlomba untuk mempelajari cara mempergunakan ruang komunikasi digital tidak hanya untuk mengekspresikan diri dan menyuarakan isu global tetapi juga, untuk menciptakan kebutuhan yang berujung pada kepentingan ekonomis.

Ruang komunikasi digital kemudian mengalami perubahan, dari sebuah wadah interaksi menjadi dunia yang didiami bersama oleh manusia. Dengan kata lain, ruang komunikasi digital menjadi wadah berada manusia. Sebagai sebuah wadah berada dan berinteraksi manusia, ruang komunikasi digital kemudian rentan terhadap berbagai isu kejahatan yang mungkin muncul seperti pencurian data dan informasi. Karena hal tersebut, paradigma keamanan nasional ikut bergeser ke arah yang lebih luas. Kini, keamanan nasional juga menyangkut jaminan keamanan pribadi warga negara di ruang komunikasi digital. Kewajiban pokok suatu negara adalah menjamin keamanan bagi warganya termasuk keamanan dari berbagai kejahatan siber (Letkol Chb Ir. Bagus Artiadi Soewardi, 2013).

Keamanan di ruang komunikasi digital adalah satu isu penting dalam keamanan nasional di bidang siber. Namun keamanan siber tidak terbatas pada ruang tersebut saja, mengingat keamanan siber berhubungan erat dengan penggunaan internet. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan menggunakan internet masuk dalam konteks keamanan



siber. Upaya untuk menjaga keamanan siber tidak hanya perlu dilakukan oleh satu negara, melainkan setiap negara perlu terlibat aktif dalam upaya tersebut. Hal tersebutlah yang mendorong terciptanya diplomasi siber.

Tulisan ini akan membahas mengenai upaya diplomasi siber khususnya di *era post truth*, seperti saat ini. *Era post truth* ditandai dengan keadaan dimana manusia lebih tertarik pada apa yang dapat menarik emosi serta kepercayaan pribadi dibandingkan pada fakta objektif. Artinya, kebenaran tidak dibentuk oleh pengetahuan objektif melainkan oleh apa yang dianggap layak untuk dipercaya dan diterima oleh manusia. Kondisi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Richard Rorty dalam *Philosophy and The Mirror of Nature*, bahwa tidak ada kebenaran yang objektif, yang merupakan representasi akurat dari sebuah realitas. Kebenaran termasuk pengetahuan lebih merupakan persoalan percakapan dan praktek sosial (Rorty, 1980). Apa yang benar kemudian lebih merupakan apa yang dapat diterima, dipercayai dan dinilai berguna bagi manusia, yang muncul dalam percakapan dan konteks masyarakat tertentu. Dengan kata lain, Rorty menolak kebenaran sebagai suatu korespondensi antara pengetahuan, pernyataan (bahasa) dan realitas. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa kebenaran tidak dapat dilihat dari sudut pandang epistemologis, melainkan dari sudut pandang hermeneutika, dimana hermeneutika berguna untuk menafsirkan dan memahami percakapan yang terjadi lintas kelompok budaya yang berbeda (Rorty, 1980).

Paper ini akan menunjukkan secara umum, bagaimana aktivitas diplomasi siber dalam era post truth sesungguhnya adalah upaya menjaga keamanan nasional melalui saluran percakapan yang hanya akan efektif, jika dapat menemukan titik pijak bersama tentang apa yang dianggap benar untuk dilakukan serta diupayakan bersama. Dengan kata lain, apa yang dianggap benar untuk dilakukan bersama oleh setiap negara dibentuk melalui hermeneutika yang tepat terhadap percakapan yang terjadi. Pesan-pesan dalam aktivitas diplomasi siber harus dapat mempengaruhi persepsi dan membentuk konsep tentang apa yang benar tentang keamanan siber, yang perlu diupayakan bersama.



Ketepatan menyampaikan pesan adalah ketepatan dalam membaca serta memaknai masing-masing kebutuhan serta kepentingan yang muncul di dalam percakapan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep tentang Era *Post Truth*

Post truth erat kaitannya dengan *postmodernisme*. *Postmodernisme* itu sendiri muncul sebagai kritik terhadap kecenderungan berpikir di zaman sebelumnya, dimana pengetahuan dan kebenaran merupakan sesuatu yang niscaya, berlaku universal, serta objektif. Kritik tersebut berangkat dari kesadaran bahwa kebenaran atau pengetahuan objektif tidak mampu mengangkat martabat manusia. Hal tersebut terbukti dari kemajuan teknologi dan pengetahuan yang gagal memajukan peradaban dunia, dan justru hadir dalam bentuk perang dan kerusakan lingkungan (Ayu, 2021). Lantas, salah satu pengertian tentang *postmodernisme* adalah aliran pemikiran dengan ciri keberpihakan pada relativitas, anti-universalitas, dan nihilistik. Karenanya, *postmodernisme* memuat kritik terhadap rasionalisme, universalisme, dan fundamentalisme sains (Ayu, 2021). Karena menolak konsep tentang kebenaran objektif dan universal, maka bagaimana kemudian manusia di era *post truth* atau *postmodernisme* ini, memaknai kebenaran? Kebenaran di era *post-truth* kemudian dipahami sebagai era dimana fakta objektif kurang memberikan pengaruh dalam membentuk pandangan publik dibandingkan daya tarik emosional dan kepercayaan pribadi (Jawahir Gustav Rizal, 2022). Hal tersebut berdampak pada tidak adanya kebenaran universal, melainkan masing-masing individu memiliki kebenarannya sendiri.

Salah satu filsuf yang pandangannya lekat dengan kondisi di atas adalah Richard Rorty. Rorty adalah filsuf yang menolak adanya teori tertentu mengenai kebenaran yaitu, perhitungan umum tertentu atas apa yang membuat kepercayaan serta kalimat adalah benar (al-Munir, 2014). Bagi Rorty, adalah sebuah kesalahan jika menilai bahwa pengetahuan (atau apa yang dianggap sebagai kebenaran) adalah cerminan dari realitas.



Pengetahuan adalah alat bagi manusia untuk menghadapi kenyataan dan bukan representasi akurat dari sebuah realitas. Apa yang dianggap benar adalah apa yang secara pragmatis berguna bagi manusia. Apa yang berguna, yang cenderung dapat diterima dan diyakini sebagai kebenaran dapat terlihat pada percakapan yang terjalin. Untuk itu, penting bagi kita meninggalkan proses penentuan kebenaran yang epistemologis untuk menuju pada pembentukan makna yang bersifat hermeneutik. Benar selalu berada dalam konteks sosial serta sejarah dari komunitas bersangkutan, dimana percakapan itu terjadi. Jadi, tidak ada kebenaran yang bersifat objektif dan universal. Kebenaran tidak berada di luar sana. Kebenaran tidak lebih, tidak kurang adalah apa yang bisa ditingkatkan dengan bahasa. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran bahwa baik manusia itu sendiri tidak memiliki kodrat yang tetap dan mengikat karena manusia selalu memiliki kebebasan untuk menentukan dirinya. Dan sama halnya dengan manusia, masyarakat pun tidak bersifat tetap melainkan dapat mengalami perubahan (Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, 1989).

Dari apa yang disampaikan di atas, era post truth ditandai dengan kepercayaan bahwa kebenaran adalah hasil rekonstruksi yang tidak berasal dari titik pijak fakta objektif dan universal, melainkan berasal dari penerimaan manusia terhadap apa yang lebih dapat dipercaya sebagai sesuatu yang benar.

2.2 Diplomasi Siber

Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi melahirkan perubahan bagi keberadaan diri manusia. Manusia kini tidak hanya “berada” dan berinteraksi di dunia nyata melainkan juga mengambil bagian dalam dunia maya. Dunia maya atau digital kini menjadi salah satu wadah hidup manusia, dimana manusia dapat berinteraksi, berkreasi serta bekerja di dalamnya. Hal tersebut tentu melahirkan berbagai profesi dan keahlian baru yang berkaitan dengan “wadah” digital tersebut. Munculnya berbagai ilmu yang berkesesuaian dengan profesi dan keahlian baru di bidang digital ini merupakan bukti



nyata bahwa dunia digital kini adalah bagian dari realitas yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Kondisi di atas tentu memberikan peluang hadirnya kejahatan serta pelanggaran di wilayah siber, yang perlu dicarikan jalan keluar. Berkenaan dengan hal tersebut, konsep keamanan nasional pun bergeser lebih jauh hingga menyentuh keamanan individu di wilayah siber. Semakin tinggi ketergantungan masyarakat akan teknologi informasi maka semakin tinggi pula resiko kejahatan siber yang mungkin dihadapi oleh masyarakat tersebut baik secara individu maupun sebagai suatu negara (Letkol Chb Ir. Bagus Artiadi Soewardi, 2013). Beberapa kejahatan siber yang mungkin muncul antara lain; penipuan *phising*, peretasan, *cyber bullying*, dan *cyber stalking* (Pertiwi, n.d.). Kejahatan ini dapat dengan mudah dilaksanakan lintas teritori negara sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan kerjasama dari setiap negara.

Salah satu upaya bersama untuk menekan tindak kejahatan di ruang siber terwujud dalam apa yang kita sebut dengan diplomasi siber. Diplomasi pada umumnya berkaitan erat dengan proses pelaksanaan negosiasi antar negara untuk mencapai kesepakatan tertentu demi kepentingan nasional masing-masing negara. Lantas bagaimana dengan diplomasi siber? Diplomasi siber merupakan praktek internasional yang muncul sebagai upaya membangun masyarakat siber internasional, dengan menjembatani antara kepentingan nasional suatu negara serta dinamika masyarakat dunia saat ini (Iskandar Hamonangan, 2020). Karenanya, sama seperti diplomasi tradisional, diplomasi siber pun berfungsi untuk menciptakan perdamaian dan membangun sikap saling percaya di antara para pemangku kepentingan di ruang siber (Iskandar Hamonangan, 2020).

Salah satu peristiwa penting dalam diplomasi siber adalah The Paris Call for Cyber Peace, yang diinisiasi dan dilaksanakan di Perancis pada 12 November 2018. Dimana inisiatif tersebut melibatkan berbagai aktor baik swasta maupun publik dan berfokus pada kebutuhan akan hukum internasional yang dapat diaplikasikan di wilayah siber (Amel



Attatfa, 2020). Lebih lanjut, upaya untuk melahirkan ruang siber yang aman berdasarkan hukum serta peraturan yang disepakati bersama tentu tidak lepas dari upaya identifikasi jenis kejahatan serta norma yang seharusnya berlaku di ruang siber. Indonesia dalam *The Second Meeting of ASEAN Cybersecurity Coordinating Committee* yang diselenggarakan pada 30 November 2021 lalu misalnya, menyampaikan 11 implementasi norma perilaku yang menjadi prioritas utama Indonesia untuk mengatasi ancaman siber. Berbagai norma perilaku yang dimaksud sebagaimana direkomendasikan oleh UNGGE 2015, terimplementasi dalam perlindungan infrastruktur kritis, upaya memerangi penggunaan ICT oleh kelompok teroris, perkembangan radikalisme serta kekerasan ekstrimisme termasuk didalamnya, misinformasi (BSSN, 2021). Selain terlibat dalam ASEAN Cybersecurity Coordinating Committee Meeting, komitmen Indonesia terhadap keamanan di ruang siber juga terwujud dalam keikutsertaan Indonesia sebagai Co-chairs ARF ISM on ICT's Security untuk periode 2021-2024 bersama dengan Australia, Korea Selatan dan Rusia (BSSN, 2021).

3. Metodologi

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan maksud atau tujuan tertentu. Cara ilmiah merujuk pada prosedur yang bersifat rasional dan sistematis. Dalam disertasi ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif dimana data akan dikumpulkan melalui studi literatur terhadap berbagai teks utama dan pendukung yang berkaitan dengan diplomasi siber dan konsep tentang *post truth*.

4. Pembahasan

Diplomasi siber seperti diplomasi pada umumnya, berkaitan erat dengan kepentingan nasional negara-negara yang terlibat. Dalam konteks diplomasi siber, kepentingan nasional yang dimaksud berkaitan dengan upaya menjaga keamanan baik warga negara maupun negara itu sendiri di ruang siber. Perancis misalnya, sebagai pengagas *The Paris Call for*



Cyber Peace, yang merupakan inisiatif awal terhadap keamanan di ruang siber, secara lugas menuliskan keamanan siber sebagai salah satu prioritas keamanan nasionalnya di dalam Buku Putih Pertahanan Perancis (Amel Attatfa, 2020). Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa dalam hubungan internasional yang dijalankan Perancis, salah satu isu yang perlu diangkat adalah mengenai keamanan siber.

Sama halnya dengan Perancis, setiap negara memiliki kepentingan untuk mengamankan wilayah siber dalam rangka mengamankan waga serta negaranya. Untuk itu diperlukan kerjasama yang seimbang antar setiap negara untuk mewujudkan keamanan di ruang siber. Kerjasama ini perlu didasari oleh sikap keterbukaan, kepercayaan dan pemahaman akan apa yang sedang dihadapi bersama oleh setiap negara. Sikap inilah yang muncul dalam negosiasi atau proses diplomasi antar negara, dimana di dalamnya terdapat percakapan-percakapan untuk membangun dasar yang sama. Dasar yang sama adalah konstruksi tentang apa yang diterima oleh setiap negara sebagai sesuatu yang benar. Apa yang benar dalam diplomasi siber adalah apa yang secara pragmatis berguna dan dapat dijadikan tolok ukur bersama setiap negara. Misalnya, kesepakatan tentang apa saja yang masuk dalam kategori kejahatan siber, bagaimana penanganan yang tepat, dan kerjasama apa yang mungkin dilakukan, perlu didasarkan pada keberhasilan masing-masing perwakilan negara dalam menafsirkan serta memaknai kebutuhan negara yang menjadi partner dialognya. Dengan kata lain, kebenaran yang menjadi dasar pijakan bukanlah kebenaran berdasarkan fakta-fakta objektif melainkan pada masing-masing kepentingan negara yang terlibat. Kebenaran universal dari sebuah keputusan diplomatik harus sampai pada sejauh mana kebenaran tersebut dapat mewedahi kepentingan masing-masing negara. Lebih lanjut, di era *post truth*, pesan-pesan yang disampaikan terkait isu keamanan siber dalam aktivitas diplomasi siber harus dirancang sedemikian rupa agar dapat saling mempengaruhi perspektif tentang apa yang perlu diyakini dan apa yang dirasa benar untuk dilakukan. Perubahan perspektif ini penting untuk memastikan efektivitas dialog yang terjalin tanpa mengorbankan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. Nantinya, keberhasilan untuk saling mempengaruhi perspektif hingga



mencapai titik temu yang sesuai, akan dapat menciptakan identitas yang baru, yang mengikat negara-negara terlibat. Identitas yang baru, bisa saja terwujud dalam bentuk hukum internasional tentang ruang siber yang mengikat negara-negara bersangkutan.

5. Kesimpulan

Diplomasi siber di era *post truth*, bukanlah suatu aktivitas negosiasi yang mengedepankan kebenaran objektif karena satu-satunya kebenaran yang perlu dipegang dalam suatu aktivitas diplomasi adalah kepentingan nasional negara. Kebenaran “bersama” justru harus dikonstruksi dalam percakapan atau dialog yang saling mempengaruhi perspektif, yang didasari oleh kepentingan masing-masing. Upaya saling mempengaruhi perspektif ini tidak terlepas dari ketepatan dalam menyampaikan pesan-pesan diplomatis, yang nantinya akan berujung pada titik temu yang dapat dijadikan sebuah “identitas” bersama. Identitas bersama ini dapat terwujud dalam bentuk peraturan yang ditaati bersama dan mewisadahi semua kepentingan negara yang terlibat. Untuk sampai pada hal tersebut, diperlukan kemampuan hermeneutika yang baik dari setiap perwakilan negara, untuk dapat menafsirkan dan memaknai makna dibalik percakapan yang terjadi.

Referensi

- al-Munir, M. I. (2014). Epistemologi yang Menghermeneutika Menurut Richard Rorty. *Kalam*, 108.
- Amel Attatfa, d. (2020). Cyber Diplomacy: A Systematic Literature Review. *24th International Conference on Knowledge Based and Intelligent Information & Engineering Systems*.
- Ayu, T. R. (2021, 9 28). *Pengertian Postmodern & Contoh Tokohnya: Lyotard hingga Baudrillard*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/pengertian-postmodern-contoh-tokohnya-lyotard-hingga-baudrillard-gjDq>



BSSN, B. H. (2021, 11 30). *Info Terkini*. Retrieved from [bssn.go.id](https://www.bssn.go.id):

<https://www.bssn.go.id/perkuat-diplomasi-siber-di-tingkat-regional-bssn-pimpin-delegasi-indonesia-dalam-the-second-meeting-of-asean-cybersecurity-coordinating-committee/>

Iskandar Hamonangan, Z. A. (2020). Cyber Diplomacy: Menuju Masyarakat Internasional yang Damai di Era Digital. *Padjajaraan Journal of International Relations Vol.1 No.3*, 311.

Jawahir Gustav Rizal, B. G. (2022, 1 9). *Melihat Kembali Sejarah Kemunculan Istilah Post Truth*.

Retrieved from [kompas.com](https://www.kompas.com):

<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/09/060600682/melihat-kembali-sejarah-kemunculan-istilah-post-truth-?page=all>

Kota Bogor, K. (n.d.).

Letkol Chb Ir. Bagus Artiadi Soewardi, M. (2013). Perlunya Pembangunan Sistem Pertahanan Siber (Cyber Defense) yang tangguh bagi Indonesia. *Media Informasi Ditjen Pohan*, 2.

Pertiwi, R. (n.d.). *Kenali 4 Jenis kejahatan Siber*. Retrieved from Kominfo Kota Bogor:

<https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/740>

Rorty, R. (1980). *Philosophy and the Mirror of Nature*. New Jersey: Princeton University Press.

Rorty, R. (1989). *Contingency, Irony, and Solidarity*. New York: Cambridge University Press.

Rorty, R. (n.d.). *Richard Rorty tentang Kebenaran dan Bahasa*. Retrieved from

[newlearningonline.com: https://newlearningonline.com/new-learning/chapter-7/knowledge-relativism-more-recent-times/richard-rorty-on-truth-and-language](https://newlearningonline.com/new-learning/chapter-7/knowledge-relativism-more-recent-times/richard-rorty-on-truth-and-language)